

Dr. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si.
Margareth I. R. Rantung, SH., MAP. MH.



KEBIJAKAN PUBLIK

FORMULASI, IMPLEMENTASI
DAN EVALUASI

KEBIJAKAN PUBLIK:
FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Dr. Sisca Beatrix Kairupan, MSi.
Margareth I. R. Rantung, SH., MAP. MH.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**KEBIJAKAN PUBLIK:
FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI**

Penulis:

Dr. Sisca Beatrix Kairupan, MSi.
Margareth I. R. Rantung, SH., MAP. MH.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vii, 218, uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-244-5

Cetakan Pertama:
Juli 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nyalah buku yang berjudul “Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya kami untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik yang terus berkembang seiring dengan dinamika tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik menjadi sangat krusial di era reformasi dan otonomi daerah saat ini. Setiap hari, kita disuguhi berbagai kebijakan—mulai dari kebijakan pendidikan, kesehatan, sosial, hingga desentralisasi—yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, tidak semua kebijakan berhasil mencapai tujuannya. Banyak kebijakan yang dirumuskan dengan cermat tetapi gagal diimplementasikan, atau berhasil diimplementasikan tetapi tidak memberikan dampak yang diharapkan. Kegagalan-kegagalan ini sering kali berakar pada kurangnya pemahaman tentang proses kebijakan sebagai sebuah siklus yang utuh: formulasi, implementasi, dan evaluasi.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Secara khusus, kami berterima kasih kepada keluarga kami masing-masing yang telah memberikan pengertian dan dukungan moril sehingga buku ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami kebijakan publik, baik sebagai akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan.

Manado, 2026

Penulis,

Dr. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si.

Margareth I. R. Rantung, SH., MAP., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK.....	1
A. Definisi dan Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	1
B. Pendekatan dan Teori Utama dalam Kebijakan Publik	12
C. Aktor, Lingkungan, dan Konteks Kebijakan	25
D. Tipologi Kebijakan Publik dan Perbedaannya dengan Konsep Terkait	43
BAB 2 FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	56
A. Penyusunan Agenda Kebijakan (Agenda Setting).....	56
B. Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan Kebijakan.....	73
C. Analisis Alternatif Kebijakan	92
BAB 3 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK	107
A. Paradigma Implementasi: Top-Down vs Bottom-Up.....	108
B. Model-Model Implementasi (Van Meter & Van Horn, Edwards III, Sabatier & Mazmanian)	115
C. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi (Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi, Struktur Birokrasi).....	121
D. Peran Birokrasi Lini Depan (Street-Level Bureaucracy) dan Diskresi.....	128
E. Strategi Sosialisasi, Kepatuhan, dan Penanganan Resistensi Masyarakat	132
BAB 4 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK	138
A. Tujuan dan Ruang Lingkup Evaluasi (Akuntabilitas, Pembelajaran, Perbaikan Kebijakan)	139
B. Jenis dan Model Evaluasi: Formatif-Sumatif, Goal-Attainment, CIPP, Responsif.....	145

C. Kriteria Evaluasi: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan.....	153
D. Metode Evaluasi: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods	162
BAB 5 STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA ...	169
A. Kebijakan Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kurikulum Merdeka.....	170
B. Kebijakan Sosial: Program Keluarga Harapan (PKH).....	178
C. Kebijakan Kesehatan: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ...	184
D. Kebijakan Desentralisasi: Otonomi Daerah dan Harmoni Pusat-Daerah	189
E. Analisis Kegagalan Kebijakan dan Pelajaran yang Dapat Diambil.....	196
DAFTAR PUSTAKA.....	207
PROFIL PENULIS.....	216

BAB 1

KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

A. DEFINISI DAN CIRI-CIRI KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pendahuluan

Memahami kebijakan publik merupakan langkah pertama yang tidak terelakkan bagi siapa pun yang ingin mendalami tata kelola pemerintahan. Kebijakan publik hadir dalam berbagai bentuk: undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga kebijakan gubernur atau bupati tentang sesuatu hal. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan publik? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya melibatkan banyak perspektif dari para ahli yang telah lama menggeluti kajian ini. Sub bab ini akan mengupas tuntas definisi kebijakan publik dari berbagai tokoh terkemuka, kemudian menarik benang merah kesimpulannya, serta merinci ciri-ciri yang membedakan kebijakan publik dari bentuk keputusan atau tindakan pemerintahan lainnya. Semua pembahasan disajikan dalam alur paragraf yang runtut agar pembaca dapat mengikuti nalar berpikir yang sistematis.

2. Definisi Kebijakan Publik dari Berbagai Ahli

Salah satu pelopor ilmu kebijakan, Harold D. Lasswell, pada tahun 1956 mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu proses yang melibatkan pengambilan keputusan mengenai tujuan, alternatif, dan konsekuensi, serta mencakup strategi implementasi

BAB 2

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN (AGENDA SETTING)

1. Pendahuluan

Setelah pada Bab 1 kita membahas secara komprehensif tentang konsep dasar kebijakan publik, mulai dari definisi, ciri-ciri, pendekatan teori, aktor dan lingkungan, hubungan dengan hukum dan tata kelola, hingga tipologi kebijakan, kini kita memasuki Bab 2 yang membahas tahap pertama dari siklus kebijakan publik, yaitu formulasi kebijakan. Tahap formulasi sendiri terdiri dari beberapa langkah penting, dan langkah paling awal yang seringkali paling menentukan adalah penyusunan agenda kebijakan atau *agenda setting*.

Mengapa agenda setting dianggap sangat penting? Karena tidak semua masalah publik dapat diatasi oleh pemerintah. Setiap hari, ribuan masalah potensial muncul di masyarakat: ada yang melaporkan jalan rusak, ada yang mengeluhkan harga pangan naik, ada yang mendesak perbaikan layanan kesehatan, ada yang memprotes ketidakadilan hukum. Namun, kapasitas pemerintah sangat terbatas. Waktu, anggaran, perhatian publik, dan energi politik tidak mungkin mencakup semua masalah sekaligus. Oleh karena itu, harus ada proses seleksi: masalah mana yang akan diangkat ke panggung kebijakan publik untuk segera ditangani, dan masalah mana yang akan diabaikan atau ditunda. Proses seleksi inilah yang disebut penyusunan agenda kebijakan.

BAB 3

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Setelah suatu kebijakan publik berhasil dirumuskan melalui proses penyusunan agenda, perumusan masalah, penetapan tujuan, dan analisis alternatif (sebagaimana diuraikan dalam Bab 2), tibalah tahap yang seringkali paling menentukan nasib kebijakan tersebut: **implementasi**. Banyak kebijakan yang dirumuskan dengan sangat cermat, didukung oleh analisis biaya-manfaat yang canggih, dan disahkan dengan legitimasi politik yang kuat, tetapi gagal total di lapangan karena tidak pernah diimplementasikan dengan baik. Fenomena ini begitu umum sehingga para ahli kebijakan sering mengutip pernyataan terkenal dari Jeffrey L. Pressman dan Aaron B. Wildavsky (1984, p. xxi): *"Implementation is the missing link in policy studies. It is the process of interaction between the setting of goals and the achievement of results. Without implementation, the best-laid plans remain just that — plans."*

Bab ini akan membahas implementasi kebijakan publik secara komprehensif, dimulai dari perdebatan paradigmatik antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (3.1), kemudian dilanjutkan dengan model-model implementasi yang dikembangkan oleh para ahli terkemuka (3.2). Selanjutnya akan diuraikan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi (3.3), dengan fokus khusus pada peran birokrasi lini depan (*street-level bureaucracy*) dan diskresi (3.4). Bab ini ditutup dengan pembahasan tentang strategi

BAB 4

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Setelah suatu kebijakan publik diformulasikan (Bab 2) dan diimplementasikan (Bab 3), tibalah tahap yang tidak kalah pentingnya: **evaluasi**. Evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan penilaian sistematis terhadap proses, hasil, dan dampak suatu kebijakan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya, seberapa efisien sumber daya digunakan, dan apa konsekuensi yang tidak diinginkan yang mungkin timbul. Tanpa evaluasi, tidak ada pembelajaran (*learning*), tidak ada akuntabilitas (*accountability*), dan tidak ada perbaikan kebijakan (*policy improvement*). Kebijakan akan terus berjalan seperti kapal tanpa kompas, tanpa pernah diketahui apakah ia menuju ke arah yang benar.

Seperti yang dinyatakan oleh William N. Dunn (1981, p. 317) dalam bukunya *Public Policy Analysis: An Introduction*:

"Policy evaluation is the systematic production of information about the worth or utility of policy outcomes. It is the final stage in the policy cycle, but it also feeds back into the beginning, closing the loop and making policy a continuous process of learning and adaptation. Without evaluation, policy becomes a one-way street—a prescription without a checkup."

Evaluasi bukanlah sekadar "mencari kesalahan" atau "menghakimi" pembuat kebijakan. Evaluasi adalah instrumen rasional untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam demokrasi, evaluasi juga berfungsi sebagai alat kontrol publik terhadap pemerintah. Bab ini akan menguraikan secara sistematis tujuan dan ruang lingkup evaluasi (4.1), jenis dan model evaluasi (4.2), kriteria evaluasi yang

BAB 5

STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Setelah mempelajari konsep dasar kebijakan publik (Bab 1), proses formulasi (Bab 2), implementasi (Bab 3), dan evaluasi (Bab 4), kini tiba saatnya untuk menerapkan kerangka teoretis tersebut ke dalam konteks nyata kebijakan publik di Indonesia. Bab ini akan menguraikan lima studi kasus kebijakan penting yang mewakili berbagai sektor: pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemerintahan. Melalui studi kasus ini, pembaca diharapkan dapat melihat bagaimana teori kebijakan publik—mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi—beroperasi dalam kondisi riil yang penuh dengan kompleksitas, kontradiksi, dan dinamika politik.

Seperti yang dinyatakan oleh Robert K. Yin (2018, p. 16), pakar metodologi studi kasus: *"A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon in depth and within its real-world context, especially when the boundaries between the phenomenon and context are not clearly evident."* Setiap kebijakan yang dibahas dalam bab ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks kelembagaan, sejarah, politik, dan sosial ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan akan selalu mengaitkan kebijakan dengan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, L. (2002). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. [disebut dalam teks sebagai Leo Agustinus]
- Anderson, J. E. (1975). *Public Policy Making*. New York: Praeger Publishers.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. [dikutip sebagai buku dalam teks, tetapi sebenarnya artikel jurnal]
- Bardach, E. (1977). *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: CQ Press.
- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (1993). *Agendas and Instability in American Politics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Belton, V., & Stewart, T. J. (2002). *Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2018). *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1972). *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building*. Boston: Allyn and Bacon.
- Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1983). *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building* (2nd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Cohen, B. C. (1963). *The Press and Foreign Policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press. [buku, tetapi dikutip sebagai sumber teori agenda-setting]

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewey, J. (1938). *Logic: The Theory of Inquiry*. New York: Henry Holt and Company. [buku]
- Dunn, W. N. (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Dye, T. R. (1972). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Elmore, R. F. (1979). Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601–616.
- Goggin, M. L., Bowman, A. O'M., Lester, J. P., & O'Toole, L. J. (1990). *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Glenview, IL: Scott, Foresman/Little, Brown.
- Hjern, B., & Porter, D. O. (1981). Implementation Structures: A New Unit of Administrative Analysis. *Organization Studies*, 2(3), 211–227.
- Hood, C. C. (1983). *The Tools of Government*. London: Macmillan. [buku]
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Key, V. O. (1964). *Politics, Parties, and Pressure Groups* (5th ed.). New York: Thomas Y. Crowell.

- Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Boston: Little, Brown.
- Lasswell, H. D. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. College Park, MD: University of Maryland Press.
- Levin, H. M., & McEwan, P. J. (2001). *Cost-Effectiveness Analysis: Methods and Applications* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Lindblom, C. E. (1977). *Politics and Markets: The World's Political Economic Systems*. New York: Basic Books.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Lowi, T. J. (1964). American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory. *World Politics*, 16(4), 677–715. [artikel jurnal]
- Lowi, T. J. (1972). Four Systems of Policy, Politics, and Choice. *Public Administration Review*, 32(4), 298–310.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Niskanen, W. A. (1971). *Bureaucracy and Representative Government*. Chicago: Aldine-Atherton.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy in Action: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251–267.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (3rd ed.). Berkeley: University of California Press.

- Project Management Institute (PMI). (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (6th ed.). Newtown Square, PA: Project Management Institute.
- Quade, E. S. (1975). *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier.
- Renn, O. (2008). *Risk Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World*. London: Earthscan.
- Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. *Policy Sciences*, 4(2), 155–169. [artikel jurnal]
- Rose, R. (1984). *Understanding Big Government: The Programme Approach*. London: Sage Publications.
- Rose, R. (1993). *Lesson-Drawing in Public Policy: A Guide to Learning Across Time and Space*. Chatham, NJ: Chatham House Publishers.
- Sabatier, P. A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1999). The Advocacy Coalition Framework: An Assessment. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the Policy Process* (pp. 117–166). Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.
- Sagoff, M. (1988). *The Economy of the Earth: Philosophy, Law, and the Environment*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Salisbury, R. H. (1968). *The Analysis of Public Policy: A Search for Theories and Roles*. In A. Ranney (Ed.), *Political Science and Public Policy* (pp. 151–175). Chicago: Markham Publishing.
- Scriven, M. (1967). *The Methodology of Evaluation*. In R. E. Stake (Ed.), *Curriculum Evaluation* (pp. 39–83). Chicago: Rand McNally.
- Stake, R. E. (1975). *Evaluating the Arts in Education: A Responsive Approach*. Columbus, OH: Merrill.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Norton & Company.
- Stone, D. (1988). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. New York: W.W. Norton.
- Strange, S. (1996). *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stufflebeam, D. L. (1971). The Relevance of the CIPP Evaluation Model for Educational Accountability. *Journal of Research and Development in Education*, 5(1), 19–25.
- Truman, D. B. (1951). *The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion*. New York: Alfred A. Knopf.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). Berkeley: University of California Press. (Karya asli diterbitkan 1922)
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2011). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (5th ed.). Boston: Longman.

- Weiss, C. H. (1979). The Many Meanings of Research Utilization. *Public Administration Review*, 39(5), 426–431.
- Weiss, C. H. (1998). *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Wholey, J. S. (1983). *Evaluation and Effective Public Management*. Boston: Little, Brown.
- Wildavsky, A. (1979). *Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis*. Boston: Little, Brown.
- Wildavsky, A. (1987). Choosing Preferences by Constructing Institutions: A Cultural Theory of Preference Formation. *American Political Science Review*, 81(1), 3–22.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Undang-Undang (Nasional):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 60).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 150).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat.
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 116).

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244).
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 49).

Peraturan Pemerintah / Peraturan Presiden / Peraturan Menteri:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) – beberapa edisi (disebut secara umum dalam teks).
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Peraturan Badan / Lembaga:

1. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) [disebut dalam teks: Peraturan BKKBN No. 4 Tahun 2024].
2. Peraturan BKKBN Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Operasional Keluarga Berencana [disebut dalam teks].

Dokumen dan Laporan Resmi Lainnya:

1. Laporan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Tahun 2025.
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
4. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Sumber Lain (Narasumber, Pernyataan Pejabat Publik, Media)

1. Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti (2025) – tentang penyalahgunaan dana BOS.
2. Pernyataan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti (2025) – tentang reprioritisasi dana BOS.
3. Pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (2025) – tentang graduasi PKH dan cakupan program.
4. Pernyataan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) – tentang ketidakakuratan data DTKS.
5. Pernyataan Prof. Eko Prasajo, Guru Besar Universitas Indonesia (2025) – tentang kinerja otonomi daerah.
6. Pernyataan anggota MPR RI Firman Subagyo – tentang rekentralisasi.
7. Analisis Universitas Negeri Surabaya tentang skor Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025.
8. Temuan investigasi independen tentang dana BOS di Ponorogo (2025).
9. Laporan audit BPK/Inspektorat tentang BOS di Kabupaten Boven Digoel.

PROFIL PENULIS



Dr. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si., adalah dosen senior dan tokoh akademik terkemuka di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado (UNIMA). Lahir di Minahasa pada 8 Juni 1961, beliau telah mengabdikan diri di dunia pendidikan tinggi sejak tahun 1986 hingga sekarang, dengan jabatan akademik sebagai Lektor Kepala (Golongan IVa). Saat ini, beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado, sekaligus terus aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Perjalanan pendidikan beliau ditempuh dengan meraih gelar Sarjana (S1) Civics Hukum dari IKIP Manado (1984), kemudian melanjutkan studi Magister (S2) Administrasi Negara di Universitas Brawijaya Malang (2001), dan menyelesaikan program Doktor (S3) Ilmu Sosial dengan kekhususan Kebijakan Publik di Universitas Merdeka Malang (2012). Kombinasi pengalaman akademik dan administratif yang panjang menjadikan beliau salah satu figur sentral dalam pengembangan ilmu administrasi publik di kawasan Sulawesi Utara. Sepanjang kariernya, Dr. Sisca telah memegang berbagai jabatan strategis di lingkungan Universitas Negeri Manado, di antaranya Dekan Fakultas Ilmu Sosial (2008–2015), Pembantu Rektor III (2015–2019), Sekretaris Rektor, serta Sekretaris Lembaga Penelitian. Pengalaman kepemimpinan ini menunjukkan kapasitasnya tidak hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai pengelola institusi pendidikan yang handal. Di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, beliau telah menghasilkan berbagai karya yang terpublikasi di jurnal nasional maupun internasional, dengan fokus kajian pada kebijakan publik, pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta dampak sosial-politik dari pemilihan umum. Beberapa judul penelitiannya antara

lain *"Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa"*, *"Ethics of Public Services"*, serta *"The Influence of Direct Elections on Public Pragmatism"*. Selain itu, beliau juga aktif dalam program pengabdian masyarakat yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, khususnya dalam bidang pengembangan kewirausahaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNIMA. Dr. Sisca juga merupakan anggota aktif organisasi profesi, seperti IAPA (Ikatan Ilmu Administrasi Publik) untuk wilayah Gorontalo-Sulawesi Utara, serta pernah menjabat sebagai Sekretaris Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI) Sulawesi Utara dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa. Dengan dedikasi dan kontribusinya yang luas, Dr. Sisca Beatrix Kairupan, [M.Si.](#) terus berkomitmen untuk memajukan ilmu administrasi publik dan kebijakan di Indonesia.



Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., MAP., MH. Lahir di Tomohon 15 November 1985, adalah dosen tetap di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado (UNIMA). Saat ini secara aktif mengampu berbagai mata kuliah yang menjadi jembatan antara

ilmu hukum dan administrasi publik, seperti Hukum Administrasi Negara, Manajemen Pelayanan Publik, Perilaku Organisasi, Pengantar Ilmu Hukum, serta Administrasi Perkantoran. Perjalanan akademiknya ditempuh dengan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dan Magister Hukum (MH) dari Universitas Sam Ratulangi Manado, serta gelar Magister Administrasi Publik (MAP) dari Universitas Negeri Manado. Kombinasi latar belakang keilmuan ini menjadikannya pengajar yang multidisipliner, dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis kepastian hukum. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam forum-forum ilmiah internasional. Diantaranya sebagai peserta dan presenter dalam berbagai konferensi bergengsi, seperti *International Conference on Higher Education, Law, and Social Sciences (ICHELSS)* dan *International Joint Conference on Science and Technology (IJCST-ICSS)*, yang mengukuhkan perannya sebagai akademisi yang tidak hanya berkutat di ruang kelas, tetapi juga terus mengikuti perkembangan isu-isu global di bidang administrasi dan hukum. Dengan dedikasi yang tinggi terhadap tridharma perguruan tinggi, Margareth I. R. Rantung, SH., MAP., MH. terus berkomitmen untuk menghasilkan karya-karya ilmiah dan bahan ajar yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi negara di Indonesia.

KEBIJAKAN PUBLIK

FORMULASI, IMPLEMENTASI
DAN EVALUASI

Buku ini hadir sebagai pengantar komprehensif bagi mahasiswa, praktisi pemerintahan, dan siapa saja yang ingin memahami secara utuh proses kebijakan publik, mulai dari gagasan hingga evaluasi. Ditulis oleh dua akademisi berpengalaman, buku ini memadukan teori klasik dan kontemporer dengan realitas kebijakan di Indonesia.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik, termasuk definisi, teori utama (rasional, inkremental, sistem, pilihan publik, institusionalisme), serta peran aktor dan lingkungan kebijakan. Selanjutnya, buku ini mengupas tuntas tahap formulasi kebijakan—mulai dari penyusunan agenda, perumusan masalah, penetapan tujuan, hingga analisis alternatif kebijakan menggunakan metode seperti analisis biaya-manfaat (CBA), analisis efektivitas biaya (CEA), dan analisis multi-kriteria (MCA).

Pada bagian implementasi, penulis menguraikan perdebatan paradigma top-down vs bottom-up, model-model implementasi (Van Meter & Van Horn, Edwards III, Sabatier & Mazmanian), faktor penentu keberhasilan dan kegagalan (sumber daya, komunikasi, disposisi, struktur birokrasi), serta peran strategis birokrasi lini depan (*street-level bureaucracy*) dan diskresi. Tidak ketinggalan, strategi sosialisasi, kepatuhan, dan penanganan resistensi masyarakat dibahas secara praktis.

Evaluasi kebijakan menjadi fokus bagian selanjutnya, meliputi tujuan akuntabilitas, pembelajaran, dan perbaikan kebijakan. Berbagai model evaluasi seperti formatif-sumatif, goal-attainment, CIPP, dan responsif dijelaskan lengkap dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pembaca juga dikenalkan pada metode evaluasi kuantitatif, kualitatif, dan campuran (*mixed methods*) serta cara menyusun rekomendasi terminasi, revisi, atau perluasan kebijakan.

Sebagai penutup, buku ini menyajikan lima studi kasus kebijakan publik di Indonesia: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kurikulum Merdeka, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), otonomi daerah, serta analisis kegagalan kebijakan beserta pelajaran yang dapat diambil. Setiap kasus dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah dibahas, sehingga memudahkan pembaca dalam mengaplikasikan ilmu secara konkret.

Dengan bahasa yang sistematis, kaya akan kutipan dari para ahli, dan relevan dengan dinamika kebijakan di Indonesia, buku ini layak menjadi pegangan utama bagi siapa pun yang ingin mendalami ilmu kebijakan publik.



CV. Tahta Media Group

Sukoharjo, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.co.id
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996

